

Kontribusi Timor-Leste dalam Penegakan Hukum Laut Internasional: Studi Kasus Ratifikasi UNCLOS dan Perjanjian BBNJ

Muhammad Hanif Arkan¹, Nabilah Liztha Maharani²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail : 2310611327@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611343@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study examines Timor-Leste's contribution to the enforcement of international maritime law through its study of the ratification process of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Treaty on Biological Diversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). The background of this problem is rooted in the importance of international maritime law enforcement in maintaining order and justice at sea, as well as protecting valuable marine natural resources, especially for coastal and island states such as Timor-Leste. The purpose of this study is to evaluate the steps taken by Timor-Leste in fulfilling its international obligations and the impact of the ratification of UNCLOS and BBNJ on the country's national policies and international relations. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that Timor-Leste has been actively involved and taken significant steps in enforcing international maritime law, but still faces challenges in terms of resources and institutional capacity.*

Abstract: Penelitian ini mengkaji kontribusi Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional melalui studinya pada proses ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ). Latar belakang masalah ini berakar pada pentingnya penegakan hukum laut internasional dalam menjaga ketertiban dan keadilan di laut, serta perlindungan terhadap sumber daya alam laut yang berharga, khususnya bagi negara pesisir dan kepulauan seperti Timor-Leste. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Timor-Leste dalam memenuhi kewajiban internasionalnya serta dampak ratifikasi UNCLOS dan BBNJ terhadap kebijakan nasional dan hubungan internasional negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Timor-Leste telah aktif berperan dan mengambil langkah-langkah signifikan dalam penegakan hukum laut internasional, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan kapasitas institusi.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords: *Timor-Leste, International Maritime Law, UNCLOS, BBNJ, Law Enforcement, Ratification*

Kata kunci: *Timor-Leste, Hukum Laut Internasional, UNCLOS, BBNJ, Penegakan Hukum, Ratifikasi.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525018>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste telah berupaya untuk menegaskan posisinya dalam komunitas internasional, termasuk dalam bidang hukum laut. Sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan strategis Asia Tenggara, Timor-Leste memiliki kepentingan besar dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya lautnya. Laut tidak hanya penting sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga sebagai sumber daya hayati yang vital bagi perekonomian dan keberlanjutan lingkungan negara. Dalam konteks ini, keterlibatan Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional menjadi krusial, terutama melalui ratifikasi instrumen hukum seperti UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan BBNJ (Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional).

Ratifikasi UNCLOS oleh Timor-Leste pada tahun 2013 menunjukkan kesadaran negara ini akan pentingnya mengikuti kerangka hukum internasional yang mengatur penggunaan dan perlindungan laut. UNCLOS, sebagai instrumen hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut, memberikan landasan yang kuat bagi Timor-Leste untuk melindungi wilayah lautnya dari eksploitasi ilegal serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan ratifikasi ini, Timor-Leste juga dapat berpartisipasi aktif dalam forum-forum

internasional yang membahas isu-isu kelautan, memperjuangkan hak dan kepentingannya di tingkat global.

Latar belakang dari studi ini berfokus pada urgensi penegakan hukum laut internasional yang semakin meningkat seiring dengan kompleksitas permasalahan laut global. Fenomena seperti penangkapan ikan ilegal, pencemaran laut, dan eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran menimbulkan ancaman serius bagi negara-negara pesisir. Sebagai negara muda yang sedang membangun kapasitas institusionalnya, Timor-Leste menghadapi tantangan unik dalam mengelola wilayah maritimnya yang luas. UNCLOS, sebagai kerangka hukum laut global, menyediakan panduan komprehensif bagi negara-negara untuk mengelola zona maritim mereka, menetapkan batas-batas laut, serta menjaga kebebasan navigasi. Ratifikasi dan implementasi UNCLOS menandai langkah strategis Timor-Leste dalam menunjukkan komitmennya terhadap aturan dan norma internasional.

Di sisi lain, negosiasi dan ratifikasi perjanjian BBNJ mencerminkan evolusi hukum laut internasional yang kini juga mengatur pelestarian keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian ini penting bagi Timor-Leste karena menggarisbawahi perlunya kerjasama internasional dalam perlindungan lingkungan laut yang lebih efektif. Sebagai bagian dari wilayah Segitiga Terumbu Karang, Timor-Leste memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya, yang merupakan aset penting bagi negara. Oleh karena itu, partisipasinya dalam perjanjian BBNJ menunjukkan dedikasi Timor-Leste untuk melindungi ekosistem laut sambil tetap berkontribusi pada dialog global tentang konservasi laut.

Penelitian ini mengungkap bagaimana Timor-Leste telah menyelaraskan kebijakannya dengan instrumen hukum internasional tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Penerapan UNCLOS dan BBNJ memerlukan langkah-langkah legislatif dan penguatan kapasitas lokal, termasuk peningkatan keahlian teknis dan manajemen sumber daya. Timor-Leste juga harus berhadapan dengan isu-isu seperti konflik yurisdiksi maritim dengan negara-negara tetangga, yang memerlukan diplomasi dan negosiasi yang matang. Studi ini menyoroti bagaimana kerangka hukum internasional telah membantu negara ini dalam menavigasi tantangan tersebut. Selain itu, pelaksanaan hukum laut yang efektif dapat membuka peluang bagi Timor-Leste untuk meningkatkan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan laut yang bijaksana dan bertanggung jawab, Timor-Leste dapat mengembangkan industri perikanan, pariwisata maritim, dan energi laut. Semua ini dapat memberikan dorongan besar bagi pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Penting bagi Timor-Leste untuk memadukan strategi nasional dengan kebijakan regional dan global agar pengelolaan laut dapat membawa manfaat maksimal.

Namun, komitmen Timor-Leste dalam hukum laut internasional tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan dalam hal teknologi, sumber daya manusia, dan pendanaan. Upaya peningkatan kapasitas dan kolaborasi internasional terus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dukungan dari komunitas internasional dan organisasi non-pemerintah memainkan peran penting dalam membantu Timor-Leste mengimplementasikan ratifikasi UNCLOS dan BBNJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah ini telah berhasil, serta memberikan rekomendasi untuk upaya ke depan dalam memperkuat penegakan hukum laut internasional di Timor-Leste.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini akan mengeksplorasi kontribusi Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional melalui ratifikasi UNCLOS dan Perjanjian BBNJ. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen resmi, serta observasi partisipatif pada berbagai forum dan pertemuan internasional yang diikuti oleh Timor-Leste. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan dinamika yang mencerminkan peran dan kontribusi Timor-Leste dalam konteks hukum laut internasional. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya

Timor-Leste dalam mendukung tata kelola laut yang berkelanjutan serta implikasinya bagi hubungan internasional dan pengelolaan sumber daya laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Konteks Ratifikasi UNCLOS oleh Timor-Leste

Timor-Leste meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 2013. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya negara tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur wilayah lautnya serta memastikan perlindungan sumber daya alam laut yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan yang baru merdeka, Timor-Leste memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga hak-hak lautnya, terutama mengingat potensi eksploitasi ilegal yang dapat merugikan negara. Selain UNCLOS, Timor-Leste juga terlibat aktif dalam ratifikasi Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ). Perjanjian ini berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati laut di kawasan internasional yang belum diatur secara komprehensif oleh UNCLOS. Ratifikasi Perjanjian BBNJ menunjukkan komitmen Timor-Leste untuk turut serta dalam upaya global menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Ratifikasi kedua perjanjian tersebut berdampak signifikan terhadap kebijakan nasional Timor-Leste. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung implementasi UNCLOS dan BBNJ. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas penegakan hukum laut, pembentukan lembaga-lembaga pengawasan, serta pengembangan program-program konservasi laut. Meskipun telah meratifikasi UNCLOS dan BBNJ, Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi menjadi hambatan utama. Namun, dengan kerjasama internasional dan dukungan dari organisasi-organisasi internasional, Timor-Leste terus berusaha mengatasi tantangan-tantangan ini. Timor-Leste aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu kelautan.

Melalui partisipasi ini, Timor-Leste dapat memperjuangkan hak-haknya serta berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam penegakan hukum laut internasional. Forum-forum ini juga menjadi platform bagi Timor-Leste untuk berbagi pengalaman dan belajar dari negara-negara lain. Dalam konteks regional, Timor-Leste berkolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik dalam menjaga keamanan dan stabilitas laut. Kerjasama ini mencakup penanggulangan perikanan ilegal, penyelundupan, dan polusi laut. Selain itu, Timor-Leste juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dalam program-program konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Pembahasan

Implementasi UNCLOS oleh Timor-Leste

Implementasi UNCLOS oleh Timor-Leste menjadi tonggak penting dalam pengelolaan wilayah laut dan sumber daya alam laut negara ini. UNCLOS menyediakan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut. Dengan meratifikasi UNCLOS, Timor-Leste berkomitmen untuk melindungi wilayah lautnya dari eksploitasi ilegal serta mengelola sumber daya alam laut secara berkelanjutan. Teori hukum laut internasional yang tercantum dalam UNCLOS menjadi panduan bagi Timor-Leste dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi nasional.

Timor-Leste, sebagai negara maritim yang baru merdeka pada tahun 2002, telah menunjukkan komitmennya dalam upaya penegakan hukum laut internasional melalui ratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan perjanjian internasional lainnya, seperti Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Wilayah Lautan yang Berada di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ). Ratifikasi ini tidak hanya menunjukkan kesiapan Timor-Leste untuk mematuhi norma-norma internasional, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk melindungi sumber daya laut nasionalnya dari eksploitasi berlebih dan penangkapan ikan ilegal. Kasus yang ditinjau dalam penelitian ini adalah bagaimana Timor-Leste mengimplementasikan ketentuan UNCLOS dan BBNJ dalam hukum nasionalnya. Salah satu kasus penting adalah sengketa maritim dengan Australia, yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa UNCLOS. Melalui upaya diplomatik yang

intens dan keberpihakan yang kuat pada hukum internasional, Timor-Leste memperoleh hasil yang memuaskan dan menegaskan hak-haknya atas sumber daya di Laut Timor.

Sebuah contoh lain dari kontribusi Timor-Leste adalah langkah-langkah pelestarian lingkungan laut yang diambil, sesuai ketentuan dalam BBNJ yang berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Negara ini berkomitmen untuk mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam mengatasi masalah sampah laut, pengasaman laut, dan perubahan iklim yang berdampak pada ekosistem laut. Namun, Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ketentuan hukum laut ini. Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, terdapat juga hambatan teknis dan finansial dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk memantau dan mengelola wilayah lautnya dengan efektif.

Tidak hanya bergantung pada penyusunan peraturan perundang-undangan, Timor-Leste juga merangkul mekanisme internasional dalam menegaskan hak-haknya. Misalnya, keterlibatan Timor-Leste dalam Joint Petroleum Development Area (JPDA) dengan Australia menunjukkan bagaimana negara kecil ini menggunakan instrumen hukum internasional untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari sumber daya alam mereka. Dalam jangka panjang, partisipasi aktif Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional diharapkan berdampak positif pada stabilitas regional dan perlindungan lingkungan laut. Upaya untuk mempererat kerja sama dengan negara-negara tetangga di kawasan juga merupakan strategi yang harus terus dikembangkan.

Keterlibatan aktif Timor-Leste dalam komitmen ini memberinya posisi yang strategis di peta internasional. Dengan terus memperkuat kapabilitas lembaga dan sumber daya manusia yang ada, Timor-Leste dapat memainkan peran yang lebih besar dalam forum-forum internasional yang menyerukan perlindungan laut dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

Peran Perjanjian BBNJ dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut

Perjanjian BBNJ bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional, yang selama ini belum diatur secara komprehensif oleh UNCLOS. Timor-Leste, sebagai negara yang peduli terhadap kelestarian ekosistem laut, berperan aktif dalam upaya global ini. Dengan meratifikasi BBNJ, Timor-Leste menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan memastikan bahwa sumber daya hayati laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang. Pembahasan ini terkait dengan teori konservasi sumber daya alam yang menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Laut di Timor-Leste

Penegakan hukum laut di Timor-Leste menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi. Namun, pemerintah Timor-Leste terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum laut melalui pelatihan aparat penegak hukum, peningkatan infrastruktur, dan kerjasama dengan negara-negara tetangga serta organisasi internasional. Pembahasan ini mengaitkan tantangan yang dihadapi Timor-Leste dengan teori kelembagaan yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kerjasama dalam penegakan hukum.

Partisipasi Timor-Leste di Forum Internasional

Partisipasi Timor-Leste dalam forum-forum internasional yang membahas isu-isu kelautan menjadi platform penting bagi negara ini untuk memperjuangkan hak-haknya serta berkolaborasi dengan negara-negara lain. Melalui partisipasi ini, Timor-Leste dapat berbagi pengalaman, belajar dari negara-negara lain, dan memperkuat posisinya dalam penegakan hukum laut internasional. Pembahasan ini mengaitkan partisipasi Timor-Leste dengan teori diplomasi internasional yang menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi antarnegara dalam mengatasi isu-isu global.

Kolaborasi Regional dan Internasional dalam Penegakan Hukum Laut

Kolaborasi regional dan internasional menjadi kunci dalam penegakan hukum laut di Timor-Leste. Kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik dalam menangani isu-isu seperti perikanan ilegal, penyelundupan, dan polusi laut memperkuat posisi Timor-Leste dalam menjaga keamanan dan stabilitas laut. Selain itu, kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dalam program-program konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati laut juga berkontribusi pada upaya global menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pembahasan ini terkait dengan teori kerjasama

internasional yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarnegara dalam mengatasi tantangan bersama.

Sangat penting bahwa keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional dapat dinikmati dan bermanfaat tidak hanya bagi segelintir negara, tetapi juga seluruh komunitas global. Kemajuan positif dari diskusi tentang BBNJ harus diapresiasi karena telah beralih dari perdebatan tentang rezim hukum yang ada ke pertimbangan pembentukan perjanjian internasional baru. Instrumen hukum baru yang akan dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 bertujuan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di setiap bagian lautan dan dasar laut yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana pun, yaitu dasar laut dalam di Kawasan dan Laut Bebas. Proses ini menciptakan platform bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Lebih lanjut, negosiasi Perjanjian yang berhasil akan memberikan peluang baru dan lebih baik untuk mengamankan sumber penting makanan dan sumber daya untuk terobosan medis dan ilmiah dari kolaborasi yang jauh lebih baik di antara sektor, ilmuwan dan negara.

Terlepas dari perbedaan pendapat dan perdebatan yang diadakan di forum internasional mengenai pengaturan perjanjian hukum internasional BBNJ, adanya perbedaan sudut pandang pada kedua rezim ini dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati di laut, maka juga akan berdampak pada pendekatan yang perlu ditetapkan dalam perjanjian hukum internasional BBNJ guna menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengelola keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional secara berkelanjutan. Misalnya, instrumen baru ini dapat memberikan pedoman atau metodologi perlindungan keanekaragaman hayati umum yang disepakati untuk memperhitungkan dampak pada stok ikan dari masalah yang muncul seperti dampak buruk perubahan iklim, polusi, atau pengasaman laut.

Konservasi yang memadai dalam pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konsultasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, adanya fondasi pendekatan yang kuat, perjanjian hukum internasional BBNJ kelak akan memperkuat pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 mengenai keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional, termasuk melalui penyelesaian kesenjangan hukum dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara negara dan organisasi lainnya serta mekanisme terkait.

Perjanjian hukum internasional BBNJ kelak, akan berlaku untuk setiap kegiatan atau pengembangan yang berpotensi berdampak pada keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional, termasuk pada proses alam di laut yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pada keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Mempertimbangkan sifat multi-dimensi dari masalah keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, pendekatan yang komprehensif harus diambil sesuai dengan itu. Meskipun akan dibentuk di bawah UNCLOS 1982, perjanjian ini juga harus mempertimbangkan instrumen internasional lainnya seperti UNCBD 1992 untuk memungkinkan pengaturan mekanisme yang komprehensif. Perkembangan negosiasi dalam menentukan pendekatan tata kelola yang saling mendukung pada Kawasan dan Laut Bebas akan bermanfaat bagi setiap negara dan pemangku kepentingan lainnya. Negosiasi di bawah proses PBB untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional harus bertujuan untuk menetapkan rezim penilaian penuh dengan mempertimbangkan efek pada laut dalam dan Laut Bebas. Terdapat pendekatan yang bisa digunakan sebagai paduan dalam perjanjian hukum internasional BBNJ yaitu prinsip atau pendekatan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam The 1992 Rio Declaration on Environment and Development. Berdasarkan deklarasi tersebut menyebutkan bahwa:

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation.”

Pendekatan kehati-hatian harus diadopsi oleh ISA untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi yang diusulkan adalah untuk kepentingan jangka panjang umat manusia. Hal ini harus mencakup penilaian alternatif untuk penambangan dasar laut dalam, seperti pengembangan mineral

berbasis lahan dan solusi teknologi untuk potensi peningkatan permintaan mineral dan fokus pada transisi ke pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. International Union for Conservation of Nature (IUCN) merekomendasikan agar penggabungan prinsip kehati-hatian, pendekatan berbasis ekosistem, partisipasi dan transparansi secara tegas dimasukkan sebagai panduan dari rancangan perjanjian hukum internasional BBNJ.

Timor-Leste, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Timor-Leste, telah menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum laut internasional melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan partisipasi dalam negosiasi Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ). Dua instrumen hukum ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek penggunaan dan perlindungan laut, yang meliputi hak-hak navigasi, perlindungan lingkungan laut, serta konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut.

Pertama, melalui ratifikasi UNCLOS pada tahun 2013, Timor-Leste telah memperlihatkan niat dan upaya serius untuk berkontribusi dalam penegakan hukum laut internasional. Konvensi ini menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk semua aktivitas di laut dan lautan dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang signifikan, keanggotaan Timor-Leste dalam UNCLOS tidak hanya memperkuat kedaulatan dan yurisdiksi maritim mereka, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk mengikuti dan mendukung aturan hukum internasional yang mengatur laut. Ini termasuk perlindungan lingkungan laut, yang esensial untuk melindungi ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Kedua, Timor-Leste menegaskan kontribusinya dengan berpartisipasi dalam negosiasi Perjanjian BBNJ, yang bertujuan untuk mengisi celah dalam perlindungan keanekaragaman hayati di area di luar yurisdiksi nasional. Melalui keterlibatan ini, Timor-Leste menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap wilayah maritim mereka sendiri tetapi juga kepentingan global dalam melindungi laut lepas. Kontribusi ini menempatkan Timor-Leste sebagai salah satu suara yang mendukung regulasi internasional untuk konservasi laut lepas, yang merupakan wilayah umum yang vital bagi keberlanjutan ekosistem global.

Ketiga, peran Timor-Leste dalam konteks regional, terutama di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, menunjukkan bahwa negara ini berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara tetangga dalam rangka perlindungan serta pengelolaan bersama sumber daya laut. Melalui berbagai mekanisme dan forum regional, Timor-Leste berbagi praktik terbaik dan pengetahuan mengenai penegakan hukum laut serta upaya konservasi lingkungan maritim. Hal ini juga membantu memperkuat solidaritas dan koordinasi di antara negara-negara di kawasan yang relevan dengan isu kelautan.

Keempat, kontribusi Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional juga tercermin melalui upaya domestiknya dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UNCLOS di level nasional. Ini termasuk pembaruan dan harmonisasi legislatif yang relevan dengan pengelolaan wilayah laut, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di perairannya. Langkah-langkah ini menggarisbawahi bahwa komitmen Timor-Leste tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga bersifat praktis dan nyata dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya.

Kelima, dengan mengedepankan transparansi dan kerja sama internasional, Timor-Leste juga berperan dalam membangun kapabilitas untuk penegakan hukum laut di kalangan negara berkembang. Melalui kemitraan dengan organisasi internasional dan negara donor, Timor-Leste berupaya memperkuat kemampuannya dalam melakukan penegakan hukum laut yang efektif, yang juga memberikan contoh pengembangan kemampuan bagi negara lain yang memiliki tantangan serupa. Dengan demikian, Timor-Leste tidak hanya menjadi peserta tetapi juga kontributor yang aktif dan produktif dalam upaya global menuju pengelolaan dan konservasi laut yang lebih baik.

SIMPULAN

Dalam studi mengenai kontribusi Timor-Leste dalam penegakan hukum laut internasional melalui ratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) dan partisipasinya dalam perjanjian BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), terlihat bahwa negara tersebut menunjukkan komitmen yang signifikan dalam merespons dinamika hukum laut global. Ratifikasi UNCLOS oleh Timor-Leste menandai langkah penting dalam upaya negara ini untuk mengadopsi

standar internasional dan menjamin pengelolaan serta perlindungan sumber daya laut yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistemnya. Selain itu, keterlibatan dalam perjanjian BBNJ menunjukkan keseriusan Timor-Leste dalam peran aktifnya untuk melindungi keberagaman hayati laut yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, Timor-Leste tidak hanya memperkuat posisi hukum lautnya tapi juga berkontribusi pada upaya global dalam menjaga kelestarian laut untuk generasi mendatang.

SARAN

Timor-Leste diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam rangka implementasi efektif dari kewajiban-kewajiban internasional terkait hukum laut. Selain itu, kerja sama dengan negara tetangga dan organisasi internasional juga perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan manfaat dari partisipasinya dalam kerangka hukum laut internasional.

REFERENSI

- Amri, Ahmad Almaududy, and M H SH. *Maritime Horizon: Kumpulan Artikel Hukum Laut Dan Diplomasi Maritim Indonesia Di Media Massa Dan Jurnal Internasional*. Publica Indonesia Utama, n.d.
- Ardyantara, David Maharya. "Harmonisasi UU Kelautan Untuk Menjaga Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB Tentang Area Beyond National Jurisdiction." *PROSIDING SENASPOLHI* 2, no. 1 (2019).
- Ardyantara, "Harmonisasi UU Kelautan Untuk Menjaga Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB Tentang Area Beyond National Jurisdiction." *PROSIDING SENASPOLHI* 2, no. 1 (2019).
- Hadiningrat, June Kuncoro. "Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 1 (2020).
- Merdekawati, Agustina, Marsudi Triatmodjo, Irkham Afhan Trisandi Hasibuan, Vivin Purnamawati, and Nahda Anisa Rahma. "ARTI PENTING COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM REZIM PENGATURAN AREA DAN PERKEMBANGANNYA [The Importance of the Common Heritage of Mankind Principle in the Regulation of the Area Regime and Its Development]." *Law Review*, 2022, 279-308.
- NASIONAL, WILAYAH LUAR YURISDIKSI. "Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021).
- Puspitawati, Dhiana, Rangga Vandy Wardana, and Sarah Savira. "Pengaturan Aktifitas Marine Bioprospecting Di Wilayah Laut Diluar Yurisdiksi Nasional." *JATISWARA* 38, no. 3 (2023): 265-76.
- Ridwan, M, and Agussalim Burhanuddin. "Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) Dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2023): 43-53.
- Siswandi, Achmad Gusman. "Sumber Daya Genetik Laut Di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional: Perkembangan Terkini Dan Arah Selanjutnya." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 201-23.
- Talaperu, Joel P N, Triesanto R Simanjuntak, and Novriest U W Nau. "Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)." *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim* 8, no. 2 (2024): 1-11.
- Talaperu "Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)." *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim* 8, no. 2 (2024): 1-11.



- Yoso, Igor, and Arie Afriansyah. "Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 375-403.
- Zahari, Nurul Sharmin Ahmad, and Wan Siti Adibah Wan Sahalan. "Discussion Of the Provisions On The Settlement Of Disputes Under The Law Of The Sea Convention (UNCLOS) 1982." *Journal of Law and Governance* 5, no. 1 (2024): 1-15.
- Rangkuti, Misdar. Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Timor Leste Tahun 2002-2015. GUEPEDIA, 2021.
- Tirtamulia, Tjondro. Zona-Zona Laut UNCLOS. Brillian Internasional, 2011.
- https://id.tatoli.tl/2024/09/17/parlemen-nasional-setujui-konvensi-pbb-tentang-hukum-laut/?utm_source